

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ADE SYARIEF HIDAYATULLAH
2. Jabatan : KEPALA BIDANG
3. NHK : 252879

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 3.792.600.000

1. Tanah Seluas 1352 m2 di KAB / KOTA SERANG, HASIL SENDIRI
Rp. 405.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/10 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 186 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
CILEGON , HASIL SENDIRI Rp. 720.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/60 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 490.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 136 m2/100 m2 di KAB / KOTA
SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/48 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 1.067.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 377.500.000

1. MOBIL, BMW 320I SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
140.000.000
2. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 SEDAN Tahun 1996, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000
3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI
Rp. 2.500.000



4. MOBIL, SUZUKI AKN415F (4X2) A/T MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	31.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	37.274.217
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	4.238.374.217
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	4.238.374.217

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.